

Mendag: Indonesia Siap Hadapi Tuntutan UE Soal Nikel

Tanggal : Sabtu , 16 Januari 2021
Media : Republika
Halaman : 3
Wartawan : Iit Septyaningsih
Muatan Berita : Netral
Narasumber : Muhammad Lutfi (*Menteri Perdagangan*), Joko Widodo (*Presiden RI*)
Rubrik : Korporasi & Industri
Topik : Nikel

Mendag: Indonesia Siap Hadapi Tuntutan UE Soal Nikel

■ IIT SEPTYANINGSIH

JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menyatakan, Indonesia siap menghadapi tuntutan dari Uni Eropa (UE) terkait nikel. UE melaporkan Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Jenewa, Swiss, terkait kasus sengketa nikel (DS 592).

"Pada Kamis (14/1) sore sekitar jam tiga atau jam empat sore menjelang tutup kantor, di kantor Jenewa, kita mendapatkan notifikasi dari UE. Mereka akan terus jalan proses sengketa di WTO," kata Lutfi dalam konferensi pers yang digelar secara virtual di Jakarta, Jumat (15/1).

Lutfi mengatakan, UE menganggap aturan atau undang-undang (UU) tentang mineral dan batu bara (minerba) di Indonesia menyulitkan. Ia menyebutkan, UE menilai, aturan membatasi tingkat kompetitif dalam industri baja dan bahan baku *stainless steel*.

Indonesia, kata dia, sebagai negara demokrasi dan menjunjung tinggi hukum, akan melayani tuntutan tersebut. Namun, Lutfi menyayangkan masalah sengketa ini berlanjut.

Lutfi menyebutkan, Indonesia dan UE sedang mempunyai dua permasalahan. Pertama, DS 592 terkait masalah

nikel. Kedua, Indonesia juga tengah menggugat UE terkait diskriminasi sawit melalui aturan Renewable Energy Directive II (RED II) dengan nomor gugatan DS 593.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga mengundang UE berbicara tentang produktivitas. Disampaikan Lutfi, Kemendag tidak keberatan membantu UE melakukan negosiasi-negosiasi.

Lutfi menyatakan, siap membantu UE terkait permasalahan nikel. Lutfi juga akan berbicara dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita untuk mengirim ahli-ahli dari Indonesia.

Lutfi menyatakan, komoditas nikel Indonesia telah mengungguli UE. Sebab, terdapat pabrik baru dan berteknologi tinggi. "Tiba-tiba Indonesia menjadi pemain kedua terbesar," ujar Lutfi.

Keunggulan itu, Lutfi melanjutkan, membuat UE menuntut Indonesia dan melaporkan ke WTO. Dia menyatakan, siap menghadapi gugatan tersebut, dengan keyakinan kebijakan yang diambil pemerintah sudah tepat.

Lutfi mengungkapkan, proses baku gugatan berikutnya akan dimulai pada 25 Januari 2021. Ia menilai, sengketa soal kebijakan dagang biasa terjadi.

Terkait nikel, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengatakan, pe-

merintah akan memprioritaskan pengembangan industri hilir nikel dalam lima tahun ke depan.

Pernyataan Jokowi ini bukan tanpa alasan. Indonesia memang punya peluang besar untuk masuk ke dalam industri mobil listrik sebagai produsen utama baterai litium. Apalagi pesatnya perkembangan mobil listrik berpotensi mengubah peta geopolitik dunia.

"Khusus untuk nikel, perlu saya sampaikan Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. 25 persen cadangan nikel dunia berada di Indonesia. Yang jumlahnya kurang lebih 21 juta ton. Sehingga, Indonesia mengontrol hampir 30 persen produksi nikel global saat ini," ujar Jokowi.

Jokowi menyampaikan, jumlah cadangan bijih nikel di Indonesia merupakan potensi yang besar. Demi merealisasikan fokus pemerintah untuk mengembangkan industri hilir nikel, ia mendukung integrasi industri yang mengolah bijih nikel menjadi *pig iron nickel* (feronikel berkadar rendah), feronikel, dan baja tahan karat.

Jokowi juga mendorong agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menggarap industri pertambangan bisa bekerja sama dengan swasta hingga perusahaan multinasional. ■ ed: citra listya rini